

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR TAMAN DHANA
TAHUN 2025**



**Ruko Kedungturi Blok B1-2 Jl. Raya kedungturi No. 33-35
Taman Sepanjang Sidoarjo
TELEPON: 0317883900**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT BPR TAMAN DHANA
Alamat	Ruko Kedungturi Blok B1-B2 Jl. Raya Kedungturi No. 33-35 Kedungturi Taman Sidoarjo
Nomor Telepon	031-7883900

Penjelasan Umum:

Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat pada dasarnya adalah sistem dan proses yang mengatur bagaimana BPR dikelola secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab agar tetap dipercaya masyarakat dan stabil secara keuangan. Secara Umum, Tata Kelola BPR mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik
--	---------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut adalah bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Direksi BPR tergolong masih terpenuhi sebagian. Pemenuhan atas penerapan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Internal Audit tergolong masih terpenuhi sebagian, Saat ini BPR Taman Dhana dalam proses merger dengan BPR Wiradhana Putramas

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	MOCH ANSHOR
	Jabatan	DIREKTUR

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- 2.4.1. Direksi bertanggungjawab terhadap terlaksananya tata kelola BPR.
- 2.4.2. Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.
- 2.4.3. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- 2.4.4. Menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR.
- 2.4.5. Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap



pelaksanaan fungsi kepengurusan BPR secara efektif dan efisien.

2.4.6. Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegal yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati.

2.4.7. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

2.4.16. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan :

2.4.16.1. Sesuai Pasal 54 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, pengangkatan, pemberhentian dan/ atau pengunduran diri anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian dan/ atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perekonomian Rakyat.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Taman Dhana.
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Jabatan	KOMISARIS UTAMA

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik

2.5.1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independent.

2.5.2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.

2.5.3. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta



melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2.5.4. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dini. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.

2.5.5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.5.6. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

2.5.7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

2.5.8. Ketua Dewan Komisaris bersama anggotanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

2.5.9. Dewan Komisaris secara hukum bertanggung jawab sesuai ketentuan atau Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar BPR.

2.

Nama

BAMBANG EKO WAHONO

Jabatan

KOMISARIS

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik

2.5.1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independent.

2.5.2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.

2.5.3. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2.5.4. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dini. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.



2.5.5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.5.6. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

2.5.7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

2.5.8. Ketua Dewan Komisaris bersama anggotanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

2.5.9. Dewan Komisaris secara hukum bertanggung jawab sesuai ketentuan atau Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Rekomendasi Kepada Direksi :

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Taman Dhana.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja.



4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Saat ini BPR Taman Dhana masih hanya memiliki Komite Kredit yang bertugas untuk memutuskan kredit.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

-

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Persentase Kepemilikan (%)	20,78

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	22,35
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,35
2.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPRS ANNISA MUKTI
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS



1.	Nama	KOPKAR TJIWI KIMIA
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	48,75
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	48,75
2.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	22,35
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,35
3.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPRS ANNISA MUKTI
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,00
4.	Nama	LILIK SUGIOWATI ADMODJO
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	9,70
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	9,70
5.	Nama	GIJAN ONGKOREDJO
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	5,25
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,25
6.	Nama	GIJAN ONGKOREDJO
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPRS ANNISA MUKTI
	Persentase Kepemilikan (%)	20,75
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,75
7.	Nama	OU YANG TUNG PU
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS



	Persentase Kepemilikan (%)	3,45
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,45
8.	Nama	IR. TJATUR PRASETYA
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	6,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	6,00
9.	Nama	ANIK LESTARI MUKTI
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	1,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	1,50
10.	Nama	ANIK LESTARI MUKTI
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPRS ANNISA MUKTI
	Persentase Kepemilikan (%)	17,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	17,50
11.	Nama	DRS. SUNOTO SANTOSO
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	3,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR WIRADHANA PUTRAMAS
	Persentase Kepemilikan (%)	22,35
2.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA



Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPRS ANNISA MUKTI
Persentase Kepemilikan (%)	25,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	MOCH ANSHOR
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Edwin Suryalaksana - Pinjaman
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Edwin Suryalaksana - Pemegang Saham
2.	Nama	BAMBANG EKO WAHONO
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

anggota Direksi memiliki Hubungan Keuangan terkait adanya pinjaman, Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain, Pemegang saham
Salah satu Anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan BPR Wiradhana Putramas dan BPR Syariah Annisa Mukti terkait pemegang saham

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	MOCH ANSHOR
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	EDWIN SURYALAKSANA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	BAMBANG EKO WAHONO
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain, Pemegang saham

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp493.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp285.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp175.305.692
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp53.633.692

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp58.460.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp17.540.000



1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp50.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp42.500.000

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0



2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp59.926.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp10.560.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Untuk Perhitungan Remunerasi Direksi dan fasilitas lain serta Komisaris telah ditetapkan dalam RUPS,

Untuk perhitungan nominal Gaji dan Tunjangan Direksi adalah keseluruhan termasuk sebelum Direktur utama mengundurkan diri.

Sedangkan untuk fasilitas kendaraan dipergunakan untuk operasional kantor



12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 1,84 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,04 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,65 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,42 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,52 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 15 Januari 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi kinerja BPR dengan topik pembahasan Perbandingan Rencana Kerja terhadap laporan keuangan serta pos-pos keuangan tertentu dan Permasalahan isu-isu strategis serta kebijakan yang dihadapi BPR

2. Tanggal Rapat 10 April 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi kinerja BPR dengan topik pembahasan Perbandingan Rencana Kerja terhadap laporan keuangan serta pos-pos keuangan tertentu dan Permasalahan isu-isu strategis serta kebijakan yang dihadapi BPR

3. Tanggal Rapat 16 Juli 2025

Jumlah Peserta 2 orang



Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi kinerja BPR dengan topik pembahasan Perbandingan Rencana Kerja terhadap laporan keuangan serta pos-pos keuangan tertentu dan Permasalahan isu-isu strategis serta kebijakan yang dihadapi BPR

4. Tanggal Rapat 16 Oktober 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi kinerja BPR dengan topik pembahasan Perbandingan Rencana Kerja terhadap laporan keuangan serta pos-pos keuangan tertentu dan Permasalahan isu-isu strategis serta kebijakan yang dihadapi BPR

5. Tanggal Rapat 24 November 2025

Jumlah Peserta 3 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi kinerja BPR dengan topik pembahasan Perbandingan Rencana Kerja terhadap laporan keuangan serta pos-pos keuangan tertentu dan Permasalahan isu-isu strategis serta kebijakan yang dihadapi BPR serta pembahasan penyusunan Rencana Bisnis Bank(RBB).

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1. Nama Anggota Dewan Komisaris EDWIN SURYALAKSANA

Frekuensi Kehadiran (Fisik) 5 kali hadir

Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) 0 kali hadir

2. Nama Anggota Dewan Komisaris BAMBANG EKO WAHONO

Frekuensi Kehadiran (Fisik) 5 kali hadir

Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) 0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan 0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang	0 kasus



Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	MOCH ANSHOR
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	DIREKTUR
	Nama Pengambil Keputusan	EDWIN SURYALAKSANA
	Jabatan Pengambil Keputusan	KOMISARIS UTAMA
	Jenis Transaksi	PINJAMAN
	Nilai Transaksi	Rp121.550.003
	Keterangan: Transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	

Dalam Tahun 2025 terdapat transaksi yang melibatkan pengurus, namun transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan sistem dan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	24 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat sekitar yang kurang mampu
	Penjelasan Kegiatan	Pembagian beras zakat fitrah
	Jumlah (Rp)	Rp3.977.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	10 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Alhikmahkelurahan kedungturi



	Sidoarjo
Penjelasan Kegiatan	Penyerahan hewan kurban
Jumlah (Rp)	Rp4.000.000

Dana sumbangan telah disalurkan dengan baik bagi yang berhak menerima.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR TAMAN DHANA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 29 April 2026

PT. BPR TAMAN DHANA

Disetujui,

Moch Anshor
Direksi



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
TAMAN DHANA

Mengetahui,

Edwin Suryalaksana
Komisaris Utama